

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Saham Bir Diganti Investasi Halal

Hasil Penjualan Rp 1 Triliun untuk Bangun Sekolah

Gambir, Warta Kota

Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menjual saham yang dimiliki di PT Delta Djakarta. Dengan penjualan itu, diharapkan bisa mendapatkan dana senilai Rp 1 triliun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengumumkan penjualan saham itu, Rabu (16/5).

"Pada kesempatan malam hari ini saya dan Pak Wagub akan mengumumkan kebijakan yang sudah menjadi rencana dan janji kami sejak lama. Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25 persen saham di perusahaan pembuat bir. Jadi 26,25 persen itu kami pasti dilepas. Jadi ini bukan akan,

tapi pasti dilepas," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI.

Menurut rencana, hasil penjualan saham perusahaan bir itu akan digunakan untuk mendanai pembangunan.

"Kami berharap yakin bahwa penjualan (saham) 26,25 persen ini kami akan mendapatkan tambahan pemasukan lebih dari Rp 1 triliun. Jadi kalau mau mendapatkan Rp 1 triliun dengan memperjualkan saham di Delta mungkin kita perlu 30 tahun lebih," kata Anies.

Ia mengacu pada pendapatan Pemprov selama ini dari pembagian dividen PR Delta Djakarta. Dengan saham yang dimiliki di PT Delta, setiap tahunnya Pemprov DKI mendapat dividen rata-rata berkisar

Rp 38 miliar. Dengan dividen sebesar itu, untuk mendapatkan dana Rp 1 triliun, diperlukan waktu hampir 30 tahun. Namun dana sebesar itu bisa diperoleh sekaligus dengan menjual saham.

Akan tetapi, pelepasan saham itu harus mendapat persetujuan DPRD DKI Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI belum mendapatkan persetujuan itu. Ini prosesnya nanti perlu persetujuan DPRD. Kami kirimkan suratnya ke sana dan nanti kami jalani proses formal artinya," ujar Anies.

Ketika ditanya kemungkinan batalnya pelepasan saham karena tak disetujui DPRD, Anies tetap

Anda Ingin Mengomentari berita ini? Silakan Tika di Facebook Wartakotalive



Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengumumkan penjualan saham Pemprov di PT Delta Djakarta, Rabu (16/5).

PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional.

Saham mayoritas dipegang San Miguel Malaysia Pte

58,3 %

Pemprov DKI Jakarta memiliki saham

26,25 %

Setiap tahun Pemprov DKI rata-rata mendapat dividen

Rp 38 miliar.



Foto: Yulia Ningsih/Grafika: DGB

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indones	Pos Kota	Warta Kota

Saham Bir Diganti Investasi Halal

optimis rencananya bakal mulus. "Insyaallah, insyaallah, katanya sambil tersenyum..

Untuk melepas saham PT Delta Djakarta memang harus melewati proses panjang. Gubernur DKI Jakarta Fauz (lebih dulu bersurat kepada pihak DPRD DKI Jakarta. Setelah itu DPRD melakukan sidang Paripurna terkait penjelasan Pemprov untuk melepas saham tersebut.

"Tentunya nanti selain dengan DPRD, kita akan koordinasi dengan OJK, BI, dan pihak pihak terkait seperti penasihat keuangan, KIPU, notaris, konsultan hukum, untuk memastikan prosesnya transparan, kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Sandi di Balai Kota. Kamis (17/3).

Investasi sosial

Selain karena janji kampanye, Sandi juga menyampaikan bahwa pelepasan saham PT Delta Djakarta dikarenakan ketidakmampuan DKI menambal investasi.

Salah satu juga yang menjadi landasan keputusan untuk melepas saham adalah

diskusi kami dengan mitra yang selama ini menyatakan mereka ingin ekspansi, tetapi karena posisi pemprov tidak bisa menambah investasinya di Delta Djakarta, mereka belum bisa berkembang," katanya.

Sandi mengungkapkan bahwa apabila melepas saham tersebut Pemprov DKI bakal mendapatkan Rp 1 triliun dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita mendapat hasil maksimal, dan itu bisa langsung dirasakan masyarakat. Kalau di atas Rp 1 Tr itu, bisa membangun 60 gedung sekolah atau melakukan rehab 60 gedung sekolah, bisa membangun satu atau dua sekolah taraf internasional, bisa membuka lapangan kerja dengan menghasilkan lokasi-lokasi yang meramping PKL. Kalau kita lihat skybridge yang angkanya Rp 25 miliar, bisa membangun berapa skybrdge itu," ujarnya.

"Itu harapan kita, jangan sampai kita mengabaikan kebutuhan masyarakat. Tentunya proses memohon

perizinan dari DPRD kita akan lakukan sesuai dengan ketentuan," tambah Sandi.

Di samping itu, kata Sandi, ia berharap dengan dikupasnya saham PT Delta, Pemprov DKI bakal bisa berinvestasi dengan halal. "Kita ingin tentunya mendapatkan dividen yang halal dan toyyib," ujarnya.

Sandi yakin pelepasan saham tersebut tidak akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD). Ia menilai, investasi yang sama dapat digunakan investasi sosial.

"Jadi gim. In finance one on one. Buat teman-teman, kita anti-pas. Lets say, konservatif, dapat Rp 1 triliun, kita deposit-in. Sekarang bunga kalau deposito berapa? Bunga yang tertinggi 4 persen. Ya 4 persen kurang lebih. Nggak ngapain- ngapain saja kita terima Rp 40 miliar per tahun. In finance one on one," ujar Sandi.

"Tapi kita kan akan melakukan investasi dengan uang tersebut dan investasinya adalah di fasilitas masyarakat, yang secara social investment, rate of return-nya akan jauh

lebih tinggi. Jadi saya yakin justru akan berlipat ganda PAD-nya," tambahnya.

Cari Prasctio

Mengenai perselubungan DPRD, Sandi mengaku sudah beberapa hari terakhir mencari-cari Ketua DPRD DKI Jakarta PraseLo Edi Marsudi. Ia ingin menjelaskan secara langsung kepada Prasctio tentang alasan Pemprov DKI melepas saham perusahaan bir tersebut.

Namun, meski ada beberapa agenda rapat paripurna, Sandi tetap tidak bisa bertemu Prasctio. "Jadi, saya sudah dua hari sudah tiga hari ke paripurna mencari Pak Pras," ujar Sandi.

Dikatakan Sandi, ia juga sudah sempat berbicara informal ke sejumlah anggota Dewan mengenai rencana ini. Yang lain sudah saya beritahu secara lisan. Saya sudah berbicara dengan Bu Yuke dan PDIP. Saya ingin bicara sama Pak Pras, tapi Pak Pras belum ada, pas ditelepon enggak masuk-masuk," jelas Sandi. (m14/Kompas.com)